

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal karena mereka menyediakan tenaga kerja dan memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan bisnis dan kewirausahaan. UMKM juga merupakan penggerak roda ekonomi (Nurprabowo & Meilani, Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional, 2023). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, UMKM juga masuk sebagai salah satu program prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan program tersebut terdiri dari berbagai kegiatan untuk mendukung perkembangan UMKM dari berbagai aspek, salah satunya adalah melalui kemitraan (Nurprabowo & Meilani, Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional, 2023).

Di negara maju, perusahaan kecil dan menengah (UMKM) biasanya dikategorikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, nilai omset tahunan, dan valuasi asset (ILO, 2015). Di setiap negara memiliki pengertian UMKM yang berbeda-beda. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah membuat definisi UMKM menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung kontribusi UMKM di 22 negara. OECD menyebutkan UMKM mempekerjakan hingga 249 orang, termasuk usaha mikro (1–9 orang) dan usaha kecil (10–49 orang) (OECD, 2023). Di Indonesia, UMKM dikategorikan menjadi mikro, kecil, dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja, pendapatan tahunan, dan modal usaha. Telah terdapat banyak regulasi yang mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut mencakup berbagai level mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), dan lainnya (Nurprabowo & Meilani, Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional, 2023) Tabel 1.1 merupakan rangkuman dari definisi dan klasifikasi UMKM berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.

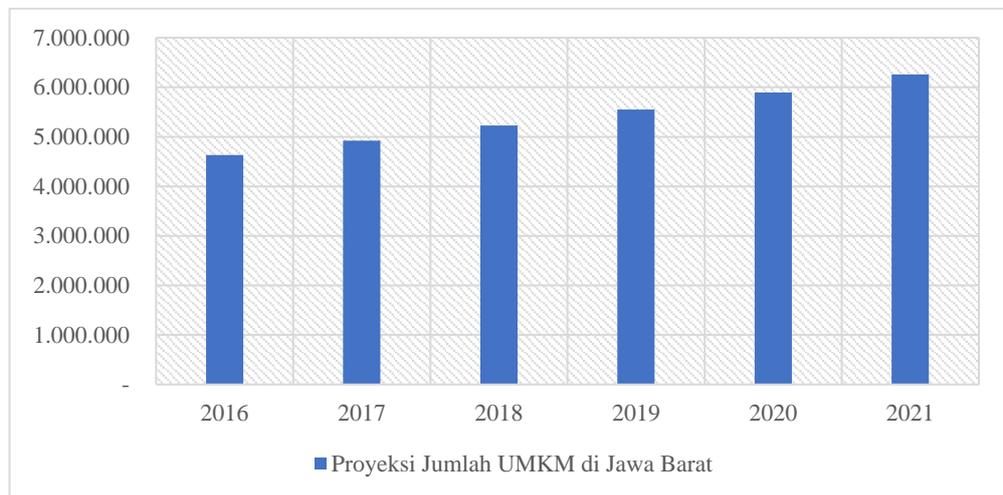
Tabel 1. 1 Definisi dan Klasifikasi UMKM di Indonesia

Kelas	Definisi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Pendapatan Tahunan	Jumlah Modal
Mikro	Bisnis produktif milik individu dan atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria bisnis mikro	1-4 orang	<Rp 2 Miliar	< Rp 1 Miliar
Kecil	Bisnis ekonomi produktif yang berdiri sendiri adalah bisnis yang didirikan oleh individu atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Bisnis ini dapat menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.	6-9 orang	Rp 2-15 Miliar	Rp 1-5 Miliar
Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,	10-99 orang	Rp 15-50 miliar	Rp 5-10 Miliar

	dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.			
--	--	--	--	--

Sumber: (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Jawa Barat, 2023)

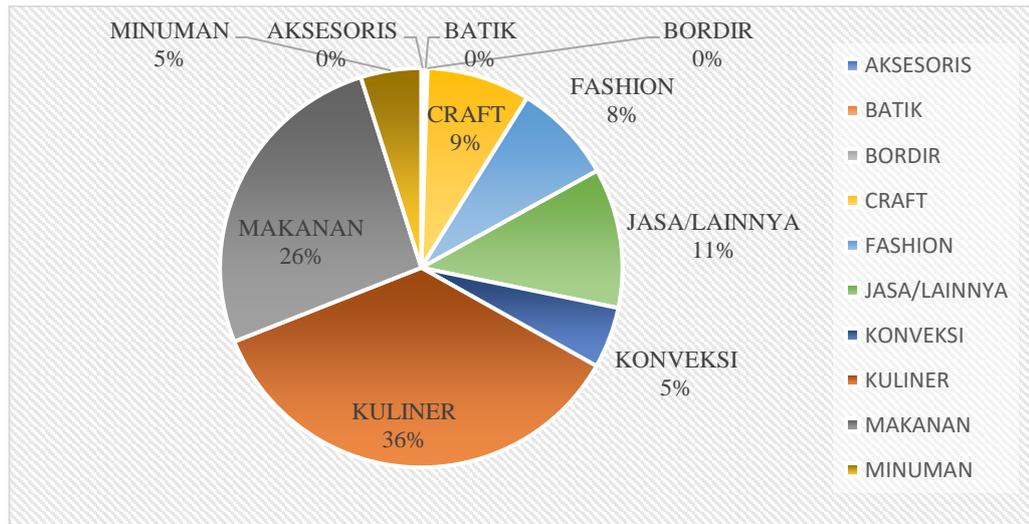
Pertumbuhan ekonomi perkapita riil suatu provinsi juga dipengaruhi oleh perbedaan lokasi provinsi tersebut. Menurut Ma'ruf dan Wihastuti (2008) provinsi yang berada di Pulau Jawa cenderung lebih sejahtera dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia (Putri, 2023). Jumlah UMKM di Jawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2021 terus meningkat dengan rata-rata penambahan mencapai 300.000 per tahun, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat pada Gambar 1.1 terlihat bahwa di Tahun 2021 proyeksi jumlah UMKM sudah mencapai 6 Juta (Open Data Jabar, 2024).



Gambar 1. 1 Proyeksi Jumlah UMKM di Jawa Barat

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2024

UMKM di Jawa Barat didominasi oleh bidang usaha kuliner dan makanan seperti pada Gambar 1.2, bidang usaha kuliner merupakan bidang usaha paling banyak di Jawa Barat dengan persentase mencapai 36% dilanjutkan dengan bidang usaha makanan yang mencapai 26%. Sedangkan bidang usaha yang paling sedikit adalah aksesoris, batik dan bordir (Open Data Jabar, 2024).



Gambar 1. 2 Persentase Bidang Usaha UMKM di Jawa Barat

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2024

Fokus penelitian ini adalah UMKM yang memiliki usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Badan usaha ini dapat berupa perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang, dengan tenaga kerja tidak lebih dari 99 orang, pendapatan tahunan tidak lebih dari 50 miliar, dan modal tidak lebih dari 10 miliar. (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022).

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

UMKM sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi terhadap PDB Nasional dan juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% (Nurprabowo dan Meilani, 2023). Banyak hal yang dilakukan oleh UMKM, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan bisnis. (Tambunan, 2011). Seperti pada Gambar 1.3 dari Tahun 2016

sampai dengan Tahun 2023 kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 50%:



Gambar 1. 3 Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia

Sumber: Kamar Dagang Indonesia Tahun 2024, Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023

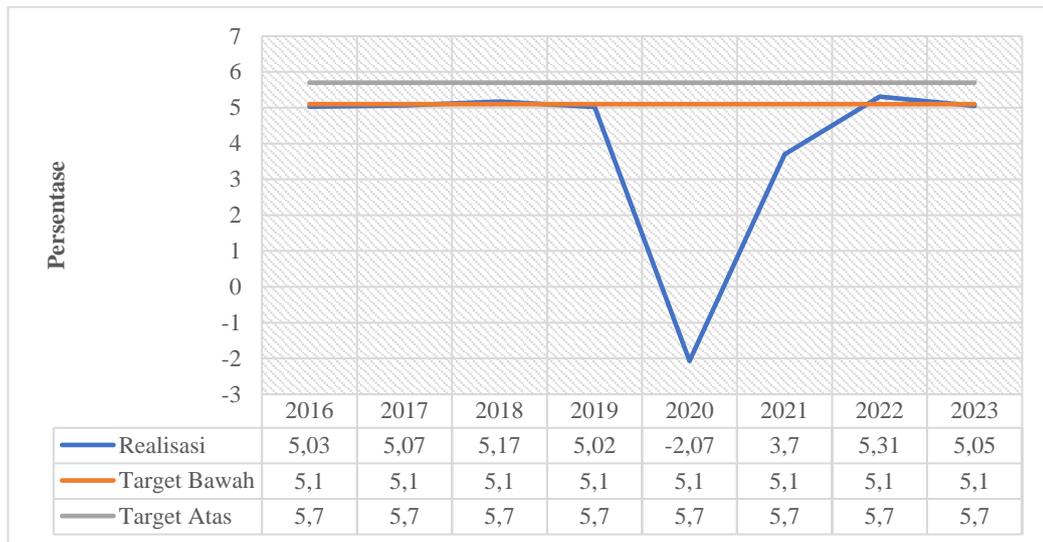
Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 kontribusi UMKM terhadap PDB terjadi penurunan, hal ini dikarenakan sedang terjadi pandemi covid-19. Namun demikian kontribusi UMKM terhadap PDB masih menjadi kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya karena memiliki persentase lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Ekonomi bertumbuh di Indonesia dari Tahun 1986 sampai dengan 2015 sanggup mencapai 5,1% dan menurut Kementerian PPN/Bappenas (2019) pertumbuhan Indonesia mampu tumbuh sampai dengan 5,7% per tahun pada 2016 sampai dengan 2045. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan inklusif ini akan membuat Indonesia pada Tahun 2036 menjadi negara dengan pendapatan tertinggi dan pada tahun 2045 akan menjadi negara dengan PDB terbesar kelima. Seperti pada Gambar 1.4 diproyeksikan nilai PDB Indonesia mencapai \$23.199 pada Tahun 2045.



Gambar 1. 4 Proyeksi PDB per Kapita (USD) Indonesia Menuju Indonesia Emas  
 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019

Namun, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2016 sampai dengan 2023 laju pertumbuhan PDB masih tidak konsisten memenuhi target. Seperti yang dilihat pada Gambar 1.5 berikut ini:

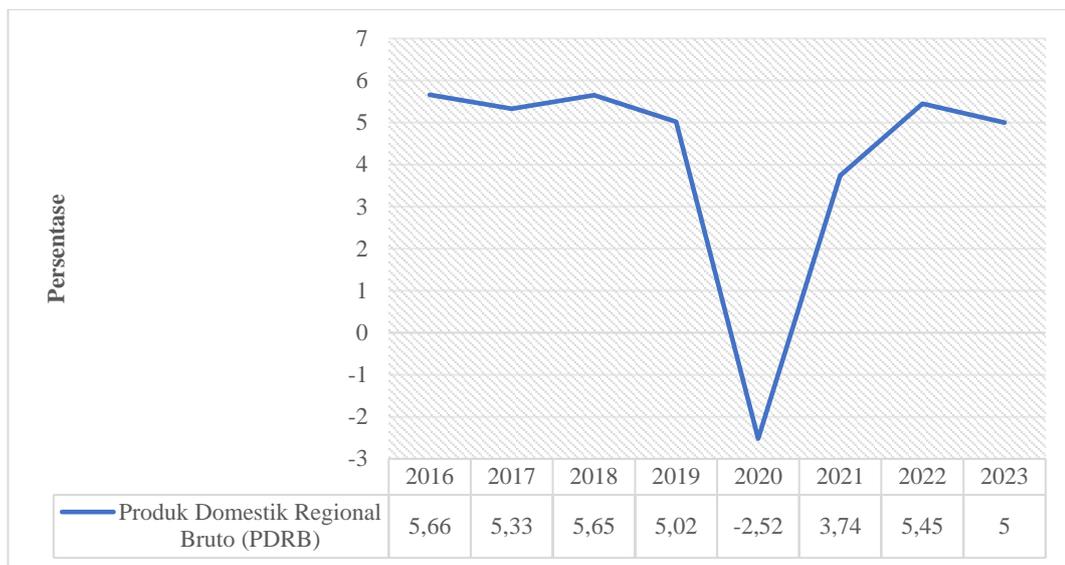


Gambar 1. 5 Pencapaian Laju Pertumbuhan PDB Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Dari Tahun 2016 sampai dengan 2023 realisasi laju pertumbuhan PDB yang mampu memenuhi target hanyalah Tahun 2018 dan 2022, itu pun hanya mampu mencapai target bawah yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bapenas Tahun 2019 yaitu 5,1%. Dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi fluktuasi laju ekspansi

ekonomi, sedangkan pada Tahun 2019 sampai dengan 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun signifikan hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19. Setelah kondisi pandemi covid-19 mereda maka pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi kemudian pada Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi kembali menurun. Hal ini juga berlaku pada laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang merupakan penyumbang PDB terbesar kedua setelah DKI Jakarta.

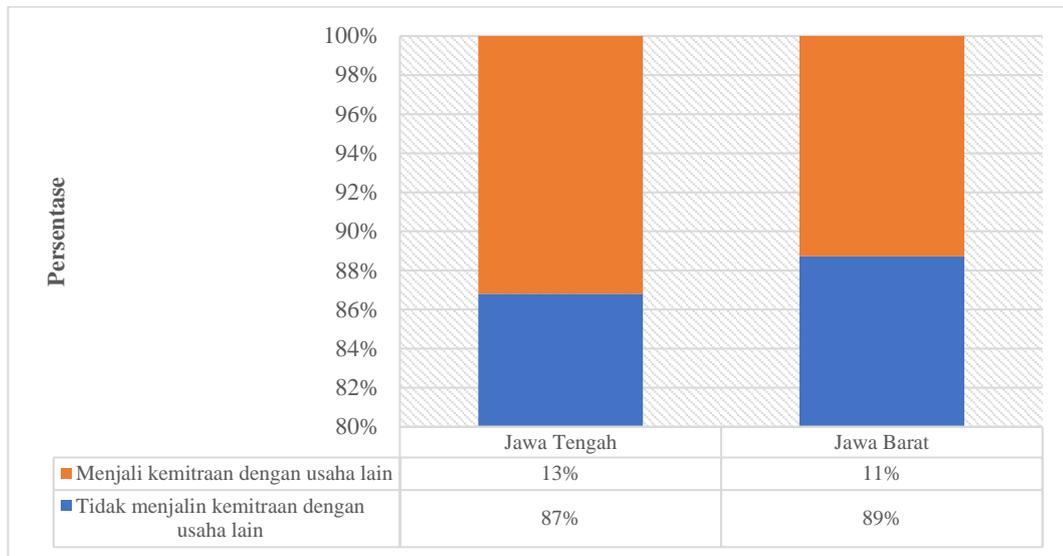


Gambar 1. 6 Pencapaian Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Barat

Pada Gambar 1.6 terlihat laju PDRB mengalami fluktuasi yang sama dengan laju PDB dari Tahun 2016 sampai 2023. Laju pertumbuhan PDRB Jawa Barat di Tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan sektor industri pengolahan pada alat angkatan dan pengolahan logam yang melemah (PPN/Bappenas, 2024). Meskipun demikian UMKM tetap memiliki kontribusi paling tinggi terhadap laju PDRB di Jawa Barat karena kontribusinya yang mencapai 57,14 persen (Andriyana, 2022). Perubahan laju pertumbuhan UMKM akan menjadi sangat vital bagi kondisi laju pertumbuhan PDRB dan PDB. Melihat tingginya kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan juga di Indonesia, maka diperlukan strategi yang dapat membantu untuk meningkatkan kinerja UMKM. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan juga

masyarakat untuk saling berkolaborasi dan mengembangkan potensi UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan ekonomi melalui peningkatan kinerja UMKM dapat dilakukan dengan program kemitraan. Program Kinerja UKM sangat dipengaruhi oleh kemitraan (Aulia, 2023). Sebagai provinsi dengan UMKM terbanyak di Indonesia (Putri, 2023), Jawa Barat telah berupaya menciptakan ekosistem yang membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus menumbuhkan iklim usaha UMKM. Salah satu aspek bisa melalui program kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama bisnis antara koperasi, UMKM, dan atau usaha besar yang dibantu oleh usaha menengah dan usaha besar dalam pembinaan dan pengembangan, dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan juga dapat didefinisikan sebagai penguatan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bersama untuk meningkatkan pendapatan, kelangsungan usaha, kuantitas produksi, dan kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, dan meningkatkan kemampuan bisnis kelompok mitra secara mandiri (Wulandari & Nadapdap, 2020). Jaringan atau kemitraan merupakan salah satu komponen keberhasilan terpenting yang berdampak terhadap keuntungan UMKM (Rodrigues et al., 2021). Kemitraan sangat penting dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah karena dengan adanya kemitraan usaha kecil dan menengah dimudahkan untuk memperoleh permodalan dan sistem pemasaran (Hulu, 2021).

Dengan adanya peraturan pemerintah daerah tersebut seharusnya peluang UMKM untuk bermitra dan meningkatkan kinerjanya menjadi lebih luas. Namun, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Tahun 2022 jumlah UMKM yang menjalin kemitraan dengan usaha lain di Jawa Barat masih tergolong rendah seperti pada Gambar 1.7 berikut ini

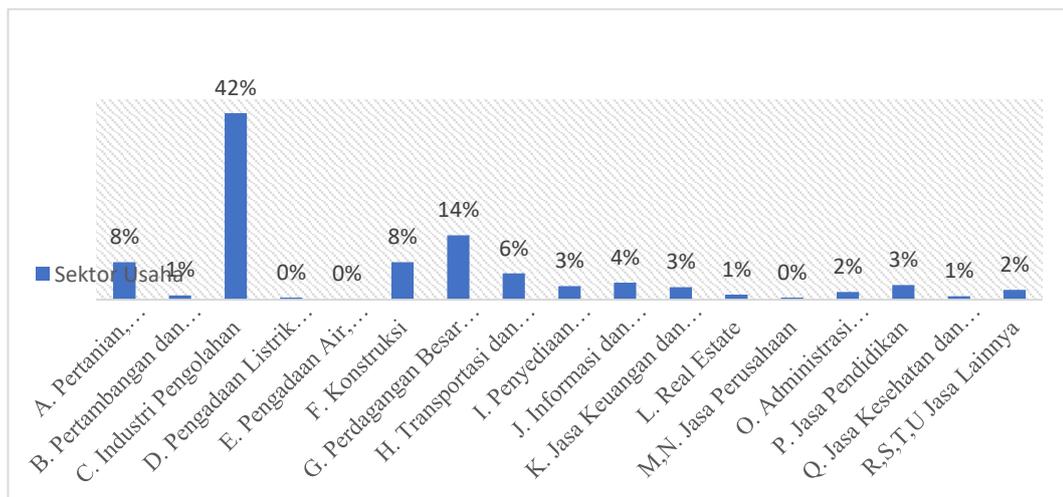


Gambar 1. 7 Persentase UMKM yang Menjalin Kemitraan dengan Usaha Lain Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase kemitraan UMKM tertinggi di Indonesia, sedangkan Jawa Barat berada di peringkat ke-2 dengan persentase 11% terpaut 2% dengan Provinsi Jawa Tengah. Adapun pola kemitraan yang dijalankan oleh UMKM di Jawa Barat paling banyak adalah kerjasama operasional (BPS, 2023). Padahal program kemitraan bukan hanya dapat meningkatkan kinerja UMKM melainkan menjadi implementasi dari *corporate social responsibility* suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari *corporate social responsibility* adalah untuk berkontribusi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs Tahun 2030. Sedangkan implementasi *corporate social responsibility* dapat membantu peningkatan kinerja bukan hanya secara langsung tetapi jika dimediasi oleh variabel lainnya, seperti yang dilakukan oleh (Le, Ngo, & Aureliano-Silva, 2023) yang menunjukkan bahwa implementasi *corporate social responsibility* mengawali peningkatan kinerja perusahaan, karena dengan peningkatan implementasi *corporate social responsibility*, kepercayaan pelanggan terhadap merek dan loyalitas pelanggan terhadap merk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh PT Jababeka Infrastruktur mengajarkan keterampilan seperti usaha jahit dan ternak

sapi, dan kemudian memberikan dana sebagai modal awal kepada masyarakat sekitar. Atau yang dilakukan PT Adaro Indonesia, Tbk yang melakukan program kemitraan untuk membuat UMKM berkelanjutan. PT Indominco Mandiri juga mengembangkan usaha kecil rumput laut dan membantu masyarakat dengan memberikan pelatihan (Mahani, 2011). Penerapan *corporate social responsibility* yang didukung oleh pemerintah dapat meningkatkan kinerja dan daya saing pada UMKM (Yuniarta, Cipta, & Diatmika, 2019). Selain Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 guna meningkatkan meningkatkan ekonomi berkelanjutan, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam peraturan tersebut, perusahaan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan daerah ini merupakan tata kelola dari ISO 26000 *corporate social responsibility* atau *social responsibility* yang kemudian di Indonesia dijadikan Standard Nasional Indonesia pada Tahun 2018, SNI:ISO 26000. Sehingga setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di lingkungannya. Terutama perusahaan industri yang terletak di Jawa Barat sebagai sektor yang paling berkontribusi terhadap PDRB seperti pada Gambar 1.8

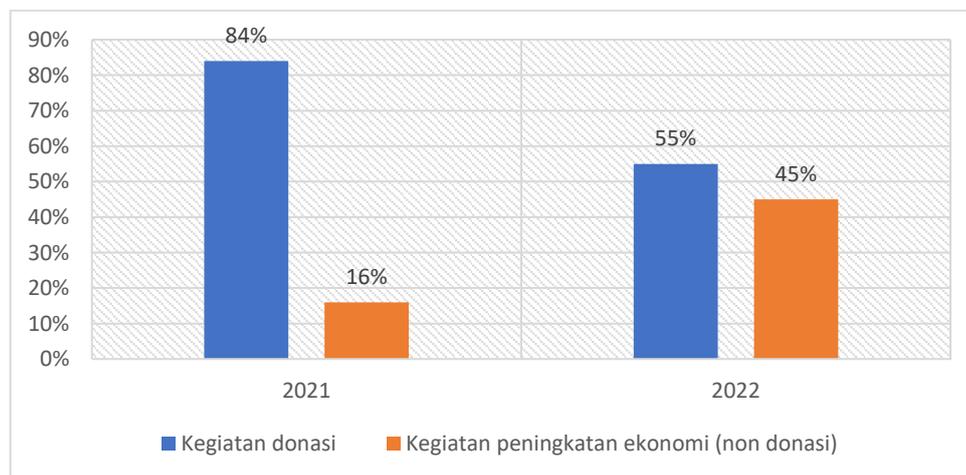


Gambar 1. 8 Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Sektor industri pengolahan berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB Jawa Barat dengan mencapai 42% dari 17 sektor usaha lainnya. Sehingga program kerjasama yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja UMKM dapat dilakukan bersama dengan perusahaan industri di Jawa Barat.

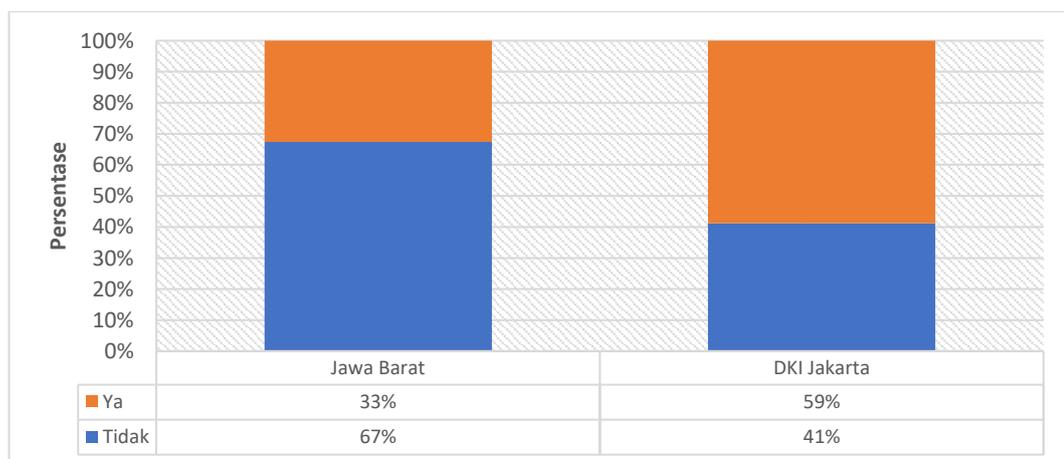
Namun, pada pelaporan implementasi *corporate social responsibility* di Pemerintah Jawa Barat kegiatan perusahaan yang bersifat kemitraan untuk mendukung program berkelanjutan dengan UMKM masih rendah jika dibandingkan dengan implementasi *corporate social responsibility* yang bersifat donasi.



Gambar 1. 9 Laporan Implementasi *Corporate Social Responsibility* di Jawa Barat  
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2022

Jika dilihat pada Gambar 1.9 pada Tahun 2021 tercatat program kemitraan dari implementasi *corporate social responsibility* yang bersifat non donasi mencapai 16% dan meingkat pada Tahun 2022 menjadi 45% (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2022). Tetapi angka ini masih dibawah target yang diinginkan, karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan bahwa program kemitraan dengan UMKM sebagai implementasi *corporate social responsibility* yang bersifat non donasi ditergetkan lebih besar dari pada yang bersifat donasi, hal ini guna meningkatkan program berkelanjutan

dengan UMKM di Jawa Barat. Persentase bantuan donasi yang dilakukan diantaranya memberikan oksigen ketika *pandemic covid-19* melanda, memberikan bantuan sembako, sumbangan untuk kegiatan masyarakat dan bantuan lainnya yang bersifat jangka pendek dan tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara langsung. Sedangkan implementasi *corporate social responsibility* yang bersifat untuk mendorong UMKM yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara langsung diantaranya adalah dengan terjalinnya kemitraan seperti bantuan akses permodalan, pelatihan dan pendampingan, bantuan dalam perizinan, sertifikasi dan standarisasi, serta bantuan dalam akses pasar. Rendahnya persentase kemitraan antara UMKM dengan perusahaan lain dan rendahnya imlementasi *corporate social responsibility* yang dapat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi di Jawa Barat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyusun program kemitraan yang dapat diimplementasikan dengan baik guna meningkatkan kinerja UMKM. Selain itu UMKM pun harus mampu meningkatkan kemampuannya agar program kemitraan dengan usaha lain bisa berlangsung dengan baik. Menurut (Aulia, 2023) kompetensi digital dapat memberikan pengaruh signifikan bukan hanya terhadap program kemitraan tetapi terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, hanya 33% UMKM di Jawa Barat yang menggunakan teknologi digital pada Tahun 2022 (Badan Pusat Statistik,2023).



Gambar 1. 10 Persentase UMKM yang Menggunakan Teknologi Digital/Internet  
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Persentase penggunaan teknologi digital pada UMKM di Jawa Barat baru mencapai 33%, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 59%. Penggunaan teknologi internet oleh para UMKM di Jawa Barat ini paling banyak dimanfaatkan untuk pemasaran atau penjualan produk sebesar 42%.

Kompetensi digital adalah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan dalam area operasi bisnis yang dapat ditingkatkan melalui solusi digital (Jasiewicz et al., 2018). Kompetensi digital dianggap sebagai kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan transformasi informasi menjadi pengetahuan, operasi, dan layanan dengan memanfaatkan TIK dan perangkat lunak sosial secara analitis, produktif, dan kreatif (Drydak, 2022). Peningkatan kompetensi digital menjadi strategi penting yang dapat menentukan arah dan keberlanjutan UMKM, karena transformasi digital berkorelasi positif terhadap kinerja UMKM, dimana faktor utama yang berdampak terhadap transformasi digital salah satunya adalah teknologi digital (Teng et al., 2022).

Selain kompetensi digital, menurut (Hariastuti dkk, 2021) ada faktor lain yang dapat meningkatkan program kemitraan yaitu *sustainable value creation*. *Sustainable value creation* merupakan faktor yang dihasilkan dari *sustainable manufacturing* yang terdiri dari *human value*, *product value*, *production value*, *equipment and technology value*, dan *organization*. *Sustainable value creation* melibatkan pengintegrasian aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam bisnis atau organisasi untuk menciptakan nilai jangka panjang (Cosenz et al., 2020). Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis inti dapat menciptakan nilai jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan (Attanasio et al., 2022). Penciptaan nilai yang berkelanjutan telah menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari bagi dunia usaha dan masyarakat karena memerlukan perubahan pola pikir dan komitmen untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Proses penciptaan nilai berkelanjutan melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan upaya integrasi internal serta eksternal dalam rantai nilai operasional perusahaan (Irawan et al., 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya didapatkan bahwa program kemitraan dapat mempengaruhi kinerja UMKM (Aulia, 2023; Rodrigues et al., 2021; Hulu, 2021), sedangkan variabel yang dapat mempengaruhi program kemitraan adalah kompetensi digital bukan hanya untuk variabel program kemitraan tetapi untuk kinerja UMKM (Aulia, 2023). Penelitian lain yang dilakukan oleh Hariastuti et al (2021) menyebutkan *sustainable value creation* berpengaruh terhadap program kemitraan. Selain itu menurut (Yulianti, 2018) program kemitraan oleh perusahaan besar merupakan bentuk implementasi dari *corporate social responsibility* yang dapat meningkatkan kinerja UMKM. Salah satu program yang sekiranya mampu untuk dijadikan perantara pengembangan kemitraan antara UMKM dan Usaha Skala Sedang dan Besar adalah program *Corporate Social Responsibility* (Rinawati & Sadewo, 2019). Dan pelibatan dan pengembangan komunitas merupakan komponen utama dari *corporate social responsibility* (Katamba, Nkiko, Kazooba, Kemeza, & Mpisi, 2014). Masyarakat dapat membantu terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan jika ikut terlibat di dalamnya (Simanulang, Ghazi, & Khairiyah, 2020). Pelibatan masyarakat mampu menaikkan daya saing UMKM (Suryaningrum, P, & Utami, 2024).

Akan tetapi, penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus pada program kemitraan antara perusahaan industri dengan UMKM. Sedangkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan UMKM terbanyak dan sektor industri merupakan sektor terluas di Jawa Barat. Selain itu penelitian (Suryaningrum, P, & Utami, 2024) yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kinerja UMKM baru sebatas kualitatif yang ditinjau dari sisi sosial. Melihat adanya gap pada penelitian yang sudah ada, penelitian ini dilakukan untuk menentukan bagaimana program kemitraan yang paling baik antara perusahaan industri dan UMKM di Jawa Barat dengan adanya variabel mediasi pelibatan dan pengembangan komunitas antara program kemitraan dengan kinerja UMKM. Selain itu pada penelitian kali ini akan menentukan variabel yang paling berpengaruh dari kompetensi digital dan *sustainable value creation* UMKM terhadap program kemitraan dan peningkatan kinerja UMKM.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk memastikan faktor yang memiliki dampak terbesar terhadap kesuksesan program kemitraan guna meningkatkan kinerja UMKM, apakah kompetensi digital dari UMKM atau kemampuan UMKM dalam menciptakan nilai berkelanjutan. Dengan mengetahui faktor tersebut maka Pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan program kemitraan antara UMKM dengan perusahaan industri. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan masukan untuk *problem owner* dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku yang berwenang dalam menciptakan iklim usaha ekonomi berkelanjutan pada UMKM dan juga penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perusahaan Industri. Pembuatan model strategi ini digunakan metode SEM seperti yang sudah dilakukan sebelumnya (Hariastuti dkk, 2021) untuk menghasilkan model konseptual dari hasil evaluasi hubungan dan efek berdasarkan data *survey* dari UMKM.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan mengenai potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat untuk membuat strategi program kemitraan yang baik antara perusahaan industri dan UMKM di Jawa Barat yang dimediasi oleh Pelibatan dan pengembangan komunitas sebagai salah satu komponen utama dari *corporate social responsibility* guna meningkatkan kinerja UMKM sehingga ekonomi berkelanjutan dapat tercapai, maka berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi digital terhadap program kemitraan?
2. Bagaimana pengaruh *sustainable value creation* terhadap program kemitraan?
3. Bagaimana pengaruh program kemitraan terhadap pelibatan dan pengembangan komunitas masyarakat?
4. Bagaimana pengaruh pelibatan dan pengembangan masyarakat terhadap kinerja UMKM?
5. Bagaimana pengaruh program kemitraan terhadap kinerja UMKM jika dimediasi oleh pelibatan dan pengembangan komunitas masyarakat?

6. Bagaimana program kemitraan berdasarkan variabel yang paling berpengaruh guna meningkatkan kinerja UMKM di Jawa Barat

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pengaruh kompetensi digital terhadap program kemitraan
2. Mengidentifikasi pengaruh *sustainable value creation* terhadap program kemitraan
3. Mengidentifikasi pengaruh program kemitraan terhadap pelibatan dan pengembangan masyarakat
4. Mengidentifikasi pengaruh pelibatan dan pengembangan masyarakat terhadap kinerja UMKM
5. Mengidentifikasi pengaruh program kemitraan terhadap kinerja UMKM jika dimediasi oleh pelibatan dan pengembangan komunitas masyarakat
6. Menghasilkan program kemitraan berdasarkan variabel yang paling berpengaruh guna meningkatkan kinerja UMKM di Jawa Barat.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Dalam aspek teoritis keilmuan dan akademik  
Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi akademisi lain dalam pengembangan penelitian untuk meningkatkan kinerja UMKM melalui strategi kemitraan. Khususnya dalam konsentrasi pengaruh kompetensi digital dan *sustainable value creation*, pelibatan dan pengembangan komunitas. Selain itu diharapkan penelitian ini bisa menjadi wawasan yang baru terkait hubungan mediasi pelibatan dan pengembangan terhadap program kemitraan dan kinerja UMKM.
2. Dalam aspek praktis bagi pemerintah, perusahaan industri dan UMKM  
Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategi dan model yang tepat untuk dalam perancangan program kemitraan antara Perusahaan

Industri dengan UMKM di Jawa Barat. Selain itu pemerintah, perusahaan industri dan UMKM juga dapat memperhatikan aspek lain seperti kompetensi digital dan juga *sustainable value creation* pada program kemitraan UMKM sehingga dengan begitu diharapkan program implementasi dan pengawasan *corporate social responsibility* pada perusahaan Industri dapat menciptakan program yang meningkatkan keberlangsungan ekonomi.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian meliputi:

##### A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai objek penelitian yaitu UMKM. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai fenomena permasalahan yang terjadi terkait dengan objek yang diteliti. Bagaimana konteks latar belakang permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai sehingga sangat perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM.

##### B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Untuk memulai penelitian sangat penting untuk mendapatkan referensi secara teori yang bisa didapatkan dari penelitian lain, buku, jurnal dan juga referensi lainnya. Pada bab ini akan mencantumkan definisi dan konsep yang digunakan untuk kinerja UMKM, program kemitraan, *corporate social responsibility*, kompetensi digital, *sustainable value creation* dan juga metode yang digunakan pada penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *structural equation modelling*. Bab ini juga membahas kerangka pemikiran, hipotesis, dan ruang lingkup penelitian ini, serta model penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan untuk proses konfirmasi penelitian ini.

##### C. BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan terkait dengan karakteristik penelitian akan dituangkan pada Bab ini. Bagaimana cara mendapatkan elaborasi variabel, dimensi dan indikator serta bagaimana mendapatkan definisi operasional pada penelitian kali ini

akan dibahas pada bab ini. Pemilihan dan batasan penelitian seperti pemilihan populasi dan sampel serta bagaimana *rule of thumb* yang digunakan untuk pengujian sampel akan dibahas.

#### D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dari survei yang diberikan kepada sampel uji akan disajikan dalam bab ini. Setelah itu, pembahasan akan dilakukan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya. Penelitian kuantitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya, analisis pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan *Model Equation Structural Partial Least Square* (SEM-PLS). Aspek pembahasan pada bab ini dimulai dengan hasil analisis data, interpretasi dan pengujian model.

#### E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Data yang sudah diolah kemudian dirangkum menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini sehingga tujuan dari penelitian ini bisa tercapai. Selain itu jika terdapat hal atau peluang lain untuk mengembangkan penelitian ini maka akan dituangkan kedalam bentuk saran pada Bab ini.